

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Dewan Pertanyakan Dokumen KUA-PPAS

Tidak Bisa Ditemukan di Website Resmi

Palmerah, Warta Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai masih tertutup soal penggodokan anggaran, khususnya terkait dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Wiliam Aditya Sarana, menyebutkan dokumen APBD KUA-PPAS tak bisa ditemukan di berbagai website resmi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta sehingga terkesan tertutup dari masyarakat.

"Belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?" ucap William saat dikonfirmasi Rabu (9/10).

Menurut William rancangan anggaran seharusnya dibuka seluas-luasnya dan dapat diakses oleh masyarakat Jakarta. Khalayak berhak tahu uang mereka digunakan untuk apa saja.

"Ini bukan uang Anggota DPRD atau uang Gubernur DKI, tapi ini adalah uang Anda, rakyat DKI Jakarta. Anda harus tahu untuk apa uang Anda digunakan," kata William.

Beberapa pengajuan anggaran dalam Dokumen APBD KUA-PPAS memang belakangan disorot oleh Fraksi PSI.

Pengajuan anggaran itu menjadi sasaran kritik berbagai pihak lantaran dinilai terlampau besar, misalnya anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang membengkak Rp 2 miliar dari Rp 18,99 miliar jadi Rp 21 miliar.

Dalam draf KUA-PPAS juga ditemukan pengajuan anggaran renovasi rumah dinas gubernur yang mencapai Rp 2,4 miliar dan pengadaan antivirus, pengadaan software dan pembelian lisensi yang mencapai Rp 12 miliar. (kompas.com)



Belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan.

Wiliam Aditya Sarana
Anggota DPRD DKI
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia

Dokumen Masih Dibahas

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan, mengakui, Pemprov DKI Jakarta belum mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 ke situs web.apbd.jakarta.go.id.

Mahendara menyebutkan, hal itu lantaran dokumen KUA-PPAS belum selesai dibahas. "Setelah selesai pembahasan, rancangan KUA-PPAS baru akan bisa dilihat di situs APBD," ujar Mahendra, Rabu (9/10).



Blog wirakarta2018

Mahendra menjelaskan, dalam sistem *e-budgeting*, KUA-PPAS akan otomatis terunggah ke situs web APBD saat KUA-PPAS selesai dibahas dan memasuki tahapan berikutnya, yakni pembahasan rancangan APBD.

Mahendra menyatakan sistem itu sudah dijalankan sejak tahun-tahun sebelumnya. "Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya."

kata dia. Dalam menyusun anggaran, tahapan pertama yang dibahas yakni rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

RKPD yang telah dibahas menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS. Namun, dokumen RKPD 2020 juga belum bisa dilihat di situs web APBD, meskipun pembahasan anggaran sudah memasuki tahapan KUA-PPAS.

Mahendra menyebut dokumen RKPD masih dalam proses diunggah ke situs web APBD. "Untuk RKPD di situs APBD masih berproses, tapi bisa dilihat di situs Bappeda, <https://bappeda.jakarta.go.id/dokumenpubliknew>," ucap Mahendra. (kompas.com)